



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN TUTUR  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Tukur sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN  
TUTUR KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Tukur yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Tukur adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tukur untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tukur yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Tukur adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Tukur serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### Pasal 2

Renja Kecamatan Tukur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Renja Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Tukur dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Tukur tahun lalu.

#### Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Tukur Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN,
  - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
  - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
  - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Tukur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Tukur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Tukur dalam menyusun RKA Kecamatan Tukur

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 172

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tukur merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Rencana kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

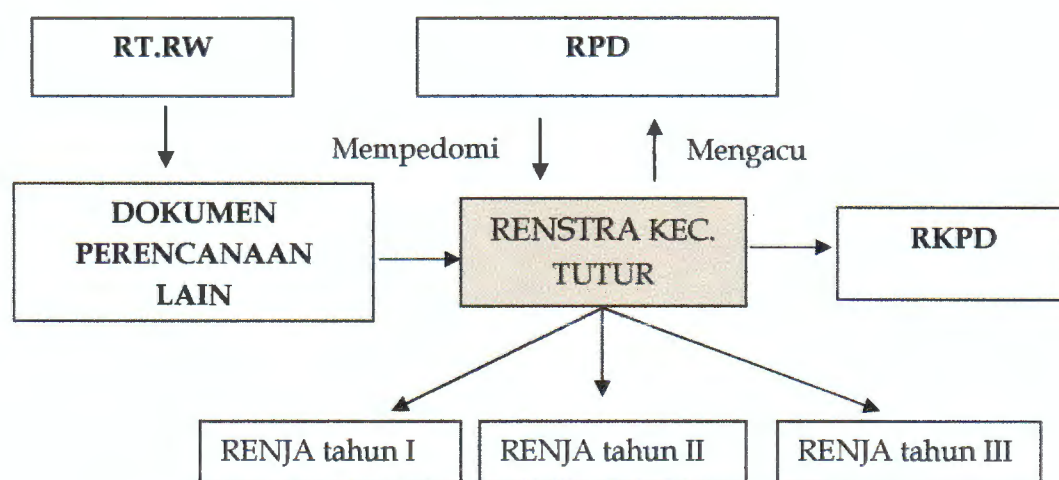
Dokumen Rencana Kerja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen rencana kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tukur Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman dilingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.



Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renja Kecamatan Tutur dalam Pembuatanya Mengacu pada Rencan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja tiga tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Oemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 Tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .....tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang dikeluarkan setiap tahunnya pada Bulan Juni)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan Dan Keuangan Daerah;
20. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender.
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Kecamatan Tukur Tahun 2024-2026;
29. Perbup Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kab Pasuruan (menyusul)

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tukur Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Tukur untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tukur.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja OPD Kecamatan Tukur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tukur selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tukur Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tukur Tahun 2024.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja OPD Kecamatan Tukur disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V PENUTUP

BAB II  
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Tukur telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2022 bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022, dan realisasi renstra Kecamatan Tukur yang mengacu pada hasil laporan kinerja sampai dengan tribulan IV sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tukur Tahun 2022:

NO.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp 000,-)	REALISASI (Rp 000,-)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5 = 4/3
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2,203,802,586</b>	<b>1,929,842,184</b>	87.57
1.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,903,227,539</b>	<b>1,704,077,550</b>	89.54
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,595,678,291	1,399,103,302	87.68
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	284,179,248	283,569,248	99.79
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	23,370,000	21,405,000	91.59
2	<b>Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>4,000,000</b>	-	0.00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,000,000	-	0.00
3	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31,996,128</b>	<b>18,557,384</b>	58.00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	31,996,128	18,557,384	58.00
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>181,227,619</b>	<b>137,450,250</b>	75.84
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	8,509,700	8,239,500	96.82
	Penyediaan peralatan dan Perengkapan Kantor	55,203,919	47,636,500	86.29
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117,514,000	81,574,250	69.42
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>83,351,300</b>	<b>69,757,000</b>	83.69
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,608,200	65,782,000	84.76
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	5,743,100	3,975,000	69.21
B.	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>15,789,600</b>	<b>7,744,000</b>	49.04
1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>15,789,600</b>	<b>7,744,000</b>	49.04
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	15,789,600	7,744,000	49.04
C.	<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>11,751,250</b>	<b>6,260,500</b>	53.28
1	<b>koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>11,751,250</b>	<b>6,260,500</b>	53.28



	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	11,751,250	6,260,500	53.28
D.	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4,000,000</b>	-	0.00
1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>4,000,000</b>	-	0.00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4,000,000	-	0.00
<b>JUMLAH</b>		<b>2,235,343,436</b>	<b>1,943,846,684</b>	<b>86.96</b>

Dari Rekapitulasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Tukur Tahun 2018 -2023. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tukur di tahun sebelumnya maka akan di dapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tukur berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan kegiatan sbb:
  - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
    - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
    - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, kegiatan sbb:
  - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
    - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan NIHIL
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan sbb:
  - Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program / Kegiatan :
    - Adanya pengurangan anggaran pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terkait kegiatan pelatihan /sosialisasi pemberdayaan masyarakat desa sehingga mempengaruhi target kinerja yang semula di targetkan 5 kegiatan pelatihan /sosialisasi namun hanya 1 yang dapat di realisasi dikarenakan keterbatasan anggaran setelah perubahan. Yang berakibat tidak tercapainya target yang sudah direncanakan.
    - Adanya pengurangan anggaran pada program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang semula ditargetkan 3 kegiatan namun hanya 1 kegiatan yang dapat di realisasikan. Sehingga target kinerja tidak maksimal.
  - Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan :
    - Proses Pengadaan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan

- Evaluasi Kinerja yang selalu dilakukan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
  6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, maka dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan diadakan evaluasi terhadap penyerapan serta perencanaan di tahun yang akan datang.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Tukur sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Tukur Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Kecamatan Tukur 2018-2023 telah dapat diketahui. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel TC. 29 sebagai berikut:

**Tabel T-C.19**  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan  
Kabupaten Pasuruan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode P-Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penerimaan Jawab	Ket	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	100	%	2,331,189,010	100	%	-	-	-	-	-	-	100	%	-	100%	0%	Kec.Tutur
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran	100	%	5,000,000	100	%	-	-	-	-	-	-	100	%	-	100%	0%	Kec.Tutur
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	10	Dokumen	5,000,000	10	Dokumen	-	-	-	-	-	-	10	Dokumen	-	100%	0%	Kec.Tutur
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	%	2,007,751,000	100	%	1,704,077,550	-	-	-	-	-	100	%	1,704,077,550	100%	85%	Kec.Tutur
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS	10	Org/bln	1,693,771,000	10	Org/bln	1,399,103,302	-	-	-	-	-	10	Org/bln	1,399,103,302	100%	83%	Kec.Tutur
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	15	Dokumen	282,000,000	15	Dokumen	283,569,248	-	-	-	-	-	15	Dokumen	283,569,248	100%	101%	Kec.Tutur
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan	7	Dokumen	31,980,000	7	Dokumen	21,405,000	-	-	-	-	-	7	Dokumen	21,405,000	100%	67%	Kec.Tutur
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	100	%	8,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec.Tutur
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	5	Paket	8,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec.Tutur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	%	194,322,910	100	%	137,450,250	-	-	-	-	-	100	%	137,450,250	100%	71%	Kec.Tutur
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Paket	65,999,910	3	Paket	47,636,500	-	-	-	-	-	3	Paket	47,636,500	100%	72%	Kec.Tutur
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	2	Paket	13,000,000	2	Paket	8,239,500	-	-	-	-	-	2	Paket	8,239,500	100%	63%	Kec.Tutur
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi perijinan dinas dan rapat koordinasi	2	Laporan	115,523,000	2	Laporan	81,574,250	-	-	-	-	-	2	Laporan	81,574,250	100%	71%	Kec.Tutur
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	8,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec.Tutur
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	2	Unit	8,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec.Tutur
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	30,000,000	100	%	18,557,384	-	-	-	-	-	100	%	18,557,384	100%	62%	Kec.Tutur

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet	48	Laporan	30,000,000	48	Laporan	18,557,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	Laporan	18,557,384	100%	62%	Kec.Tutur
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	76,515,100	100	%	69,757,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	69,757,000	100%	91%	Kec.Tutur
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8	Unit	70,772,000	8	Unit	65,782,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Unit	65,782,000	100%	93%	Kec.Tutur
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	3	Unit	5,743,100	3	Unit	3,975,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Unit	3,975,000	100%	69%	Kec.Tutur
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Nilai IKM kecamatan	100	%	262,351,990	100	%	7,744,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	7,744,000	100%	3%	Kec.Tutur
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait	4	Kali	262,351,990	1	Kali	7,744,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kali	7,744,000	25%	3%	Kec.Tutur
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Munculnya Nasionalisme - Terkonsolidasinya Usulan Murni - Tersedianya Data Usulan Murni yang sesuai Renja OPD	4	Laporan	262,351,990	1	Laporan	7,744,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Laporan	7,744,000	25%	3%	Kec.Tutur
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Nilai IKM kecamatan	100	%	250,000,000	1	Laporan	6,260,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Laporan	6,260,500	1%	3%	Kec.Tutur
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	4	Kali	250,000,000	100	Kali	6,260,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Kali	6,260,500	2500%	3%	Kec.Tutur
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	- Meningkatkan Ketrampilan Perempuan di Bidang Wirausaha - Meningkatkan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Terlaksananya Kegiatan Manaqib Rutin - Terwujudnya Kawasan Minapolitan	4	Laporan	250,000,000	4	Laporan	6,260,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Laporan	6,260,500	100%	3%	Kec.Tutur
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Nilai IKM kecamatan	100	%	15,000,000	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	-	100%	0%	Kec.Tutur
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	4	Kali	15,000,000	4	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Kali	-	100%	0%	Kec.Tutur
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA	4	Laporan	15,000,000	4	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Laporan	-	100%	0%	Kec.Tutur
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	1,771,525,247	100	%	1,958,921,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	1,958,921,300	100%	111%	Kec.Tutur
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	%	1,507,576,489	100	%	1,704,077,550	100	%	1,507,576,489	100	%	1,507,576,489	100%	%	100%	100	%	1,704,077,650	100%	113%	Kec.Tutur

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	Org/bln	1,181,468,624	10	Org/bln	1,399,103,302	10	Org/bln	1,181,468,624	10	Org/bln	1,181,468,624	100%	Org/bln	100%	10	Org/bln	1,399,103,312	100%	118%	Kec.Tutur
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	Dokumen	291,547,865	15	Dokumen	283,569,248	15	Dokumen	291,547,865	15	Dokumen	291,547,865	100%	Dokumen	100%	15	Dokumen	283,569,263	100%	97%	Kec.Tutur
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatuesahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	Dokumen	34,560,000	7	Dokumen	21,405,000	7	Dokumen	34,560,000	7	Dokumen	34,560,000	100%	Dokumen	100%	7	Dokumen	21,405,007	100%	62%	Kec.Tutur
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran	100	%	4,029,800	100	%	-	100	%	4,029,800	100	%	4,029,800	100%	%	100%	1%	%	100	0%	0%	Kec.Tutur
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	4,029,800	10	Dokumen	-	10	Dokumen	4,029,800	10	Dokumen	4,029,800	100%	Dokumen	100%	10%	Dokumen	10	1%	0%	Kec.Tutur
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	%	106,078,850	100	%	137,450,250	100	%	106,078,850	100	%	106,078,850	100%	%	100%	100	%	137,450,350	100%	130%	Kec.Tutur
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Paket	42,906,250	3	Paket	8,239,500	3	Paket	42,906,250	3	Paket	42,906,250	100%	Paket	100%	3	Paket	8,239,503	100%	19%	Kec.Tutur
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	8,104,600	2	Paket	47,636,500	2	Paket	8,104,600	2	Paket	8,104,600	100%	Paket	100%	2	Paket	47,636,502	100%	588%	Kec.Tutur
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	55,068,000	2	Laporan	81,574,250	2	Laporan	55,068,000	2	Laporan	55,068,000	100%	Laporan	100%	2	Laporan	81,574,252	100%	148%	Kec.Tutur
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Daerah	100	%	7,355,000	-	-	-	100	%	7,355,000	100	%	7,355,000	100%	%	100%	100	-	7,355,000	100%	100%	Kec.Tutur
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	5	Paket	7,355,000	-	-	-	5	Paket	7,355,000	5	Paket	7,355,000	100%	Paket	100%	5	-	7,355,000	100%	100%	Kec.Tutur
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	4,440,000	-	-	-	100	%	4,440,000	100	%	4,440,000	100%	%	100%	100	-	4,440,000	100%	100%	Kec.Tutur
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	2	Unit	4,440,000	-	-	-	2	Unit	4,440,000	2	Unit	4,440,000	100%	Unit	100%	2	-	4,440,000	100%	100%	Kec.Tutur
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	34,339,008	100	%	18,557,384	100	5%	34,339,008	100	5%	34,339,008	100%	8%	100%	100	%	18,557,484	100%	54%	Kec.Tutur
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Rekening	34,339,008	8	Unit	18,557,384	48	Laporan	34,339,008	48	Laporan	34,339,008	100%	Laporan	100%	48	Rekening	18,557,432	100%	54%	Kec.Tutur
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	107,706,100	100	%	69,757,000	100	%	107,706,100	100	%	107,706,100	100%	%	100%	100	%	69,757,100	100%	65%	Kec.Tutur
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	Unit	77,648,200	8	Unit	65,782,000	8	Unit	77,648,200	8	Unit	77,648,200	100%	Unit	100%	8	Unit	65,782,008	100%	85%	Kec.Tutur

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	30,057,900	3	Unit	3,975,000	3	Unit	30,057,900	3	Unit	30,057,900	100%	Unit	100%	3	Unit	3,975,000	100%	13%	Kec.Tutur
2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan yang baik	100	%	43,420,000	2	Laporan	7,744,000	100	%	43,420,000	100	%	43,420,000	100%	%	100%	2	Laporan	7,744,100	2%	18%	Kec.Tutur
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Laporan	43,420,000	100	%	7,744,000	4	Kali	43,420,000	4	Kali	43,420,000	100%	Kali	100%	100	%	7,744,004	10000%	18%	Kec.Tutur
		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	43,420,000	1	Laporan	7,744,000	4	Laporan	43,420,000	4	Laporan	43,420,000	100%	Laporan	100%	1.00	Laporan	7,744,004	100%	18%	Kec.Tutur
3		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase Desa / Kelurahan yang terbina dengan baik dan Presentase Kelompok masyarakat yang terbina dengan baik	1	Laporan	51,330,000	1	Laporan	6,260,500	100	%	51,330,000	100	%	51,330,000	100%	%	100%	1	Laporan	6,260,600	100%	12%	Kec.Tutur
		koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	51,330,000	100	%	6,260,500	4	Kali	51,330,000	4	Kali	51,330,000	100%	Kali	100%	100	%	6,260,504	100%	12%	Kec.Tutur
		Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Kali	51,330,000	4	Kali	6,260,500	4	Laporan	51,330,000	4	Laporan	51,330,000	100%	Laporan	100%	4	Kali	6,260,504	100%	12%	Kec.Tutur
4		Program Koordinasi Ketenraman dan Keteriban Umum	Presentase Pelayanan Ketenraman dan Keteriban Umum yang berkualitas	4	Laporan	7,680,000	4	Laporan	-	100	%	7,680,000	100	%	7,680,000	100%	%	100%	4	Laporan	100	100%	0%	Kec.Tutur
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Keteriban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Keteriban Umum	4	Laporan	7,680,000	4	Laporan	-	4	Kali	7,680,000	4	Kali	7,680,000	100%	Kali	100%	4	Laporan	4	100%	0%	Kec.Tutur
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	7,680,000	4	Laporan	-	4	Laporan	7,680,000	4	Laporan	7,680,000	100%	Laporan	100%	4	Laporan	4	100%	0%	Kec.Tutur

**Tabel 2.1**  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Akhir Periode (2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2023)					
							Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)		Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6						7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)			11=(10/4)
2021-2023																				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%	100	%	300	%	300%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran	100	%	100	5	100	%	100	%	100%	%	100	%	300	%	300%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	10	Dokumen	4	Laporan	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	Dokumen	10	Orang / bln	24	Orang / bln	240%			
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%	15	Dokumen	215	Dokumen	215%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS	10	Orang / bln	10	Orang / bln	10	Org/bln	10	Org/bln	100%	Org/bln	7	Dokumen	27	Dokumen	270%			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	15	Dokumen	15	Orang / bln	15	Dokumen	15	Dokumen	100%	Dokumen	100	%	130	%	867%			
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honor pejabat penatausahaan	7	Dokumen	7	Orang / bln	7	Dokumen	7	Dokumen	100%	Dokumen	10	Dokumen	24	Dokumen	343%			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	100	%	-	-	15	Stel	15	Stel	100%	Stel	100	%	115	%	115%			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	5	Paket	-	-	15	Stel	15	Stel	100%	Stel	5	Paket	20	Paket	400%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%	100	%	300	%	300%			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Paket	2	Jenis	3	Paket	3	Paket	100%	Paket	3	Paket	8	Paket	267%			



	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetak dan penggandaan	2	Paket	3	Jenis	2	Paket	2	Paket	100%	Paket	2	Paket	7	Paket	350%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi perjalanan dinas dan rapat koordinasi	2	Laporan	12	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	Laporan	2	Laporan	16	Laporan	800%
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	100	%	100%
	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan mebeleur	2	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Unit	2	Unit	100%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	5%	100	%	100	%	100	%	100%	%	100	5%	300	5%	300%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet	48	Laporan	48	Rekening	48	Laporan	48	Laporan	100%	Laporan	48	Laporan	144	Laporan	300%
	<i>Pemeliharaan Earing Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%	100	%	300	%	300%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8	Unit	8	Unit	8	Unit	8	Unit	100%	Unit	8	Unit	24	Unit	300%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	3	Unit	3	Jenis	3	Unit	3	Unit	100%	Unit	3	Unit	9	Unit	300%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Nilai IKM kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%	100	%	300	%	300%
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan Instansi Terkait	4	Kali	4	Kegiatan	2	Kali	2	Kali	100%	Kali	4	Kali	10	Kali	250%
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- Munculnya Nasionalisme - Terkonsolidasinya Usulan Musrenbang - Tersedianya Data Usulan Musrenbangdes yang sesuai Renja OPD	4	Laporan	4	Kegiatan	2	Laporan	2	Laporan	100%	Laporan	4	Laporan	10	Laporan	250%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Nilai IKM kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%	100	%	300	%	300%
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	4	Kali	2	Kegiatan	1	Laporan	1	Laporan	100%	Laporan	4	Kali	7	Kali	175%

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Meningkatnya Ketrampilan Perempuan di Bidang Wirasaha - Meningkatnya SDM Bidang Komunikasi dan Informasi - Terlaksananya Kegiatan Managib Rutin - Terwujudnya Kawasan Minapolitan	4	Laporan	2	Kegiatan	1	Laporan	1	Laporan	100%	Laporan	4	Laporan	7	Laporan	175%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Nilai IKM kecamatan	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	%	100	%	300	%	300%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	4	Kali	4	Kegiatan	4	Kali	4	Kali	100%	Kali	4	Kali	12	Kali	300%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi FORKOMPIMKA	4	Laporan	4	Kegiatan	4	Laporan	4	Laporan	100%	Laporan	4	Laporan	12	Laporan	300%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dengan Toga dan Tomas	4	Kegiatan	4	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Kegiatan	100%
<b>2020</b>																	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan administrasi kantor	100	%	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Output : Jumlah Terbayarnya rekening Telepon, Listrik dan Air	48	Rekening	48	Rekening	-	-	-	-	-	-	-	-	48	Rekening	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa	7	Orang / bln	7	Orang / bln	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Orang / bln	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan Kantor	1	Orang / bln	1	Orang / bln	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Orang / bln	100%
	Penyediaan alat tulis Kantor	Output : Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	45	Jenis	45	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	45	Jenis	100%
	Penyediaan barang cetakan dan Pengandaan	Output : Jumlah Tersedianya barang cetakan & Pengandaan	2	Jenis	2	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Jenis	100%
	Penyediaan peralatan & Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22	Buah	22	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	22	Buah	100%
	Penyediaan Makan dan Minum	Output : Jumlah Tersedianya mamin rapat dan tamu dinas	8	Orang	8	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Orang	100%



2019																			
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kantor</b>	100	%	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	100%
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	<b>Output</b> : Jumlah Terbayarnya rekening Telepon, Listrik dan Air	48	Rekening	48	Rekening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	Rekening	100%
	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	<b>Output</b> : Jumlah Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, Aset	7	Org/bln	7	Org/bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Org/bln	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	<b>Output</b> : Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	45	Jenis	45	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	Jenis	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>Output</b> : Jumlah Tersedianya barang cetakan & Penggandaan	2	Jenis	2	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Jenis	100%
	Penyediaan makanan dan minuman	<b>Output</b> : Jumlah Tersedianya makan rapat dan tamu dinas	8	Orang	8	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Orang	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Output</b> : Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22	Buah	22	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	Buah	100%
	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah	<b>Output</b> : Jumlah adanya rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	Laporan	12	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	<b>Output</b> : Jumlah Pembayaran Honor Jasa Kebersihan Kantor	1	Org/bln	1	Org/bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Org/bln	100%
	Penyediaan Jasa Perkantoran	<b>Output</b> : Jumlah Pembayaran Tenaga Kontrak dan THL	13	Org/bln	13	Org/bln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	Org/bln	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>Output</b> : Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	1	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Paket	100%
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kondisi baik</b>	1	%	1	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%	100%
	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Kantor	<b>Output</b> : Jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	400	Jenis	400	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	Jenis	100%
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	<b>Output</b> : Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	8	Jenis	8	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Jenis	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	<b>Output</b> : Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1	Unit	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	100%
	Pengadaan Mebelair	<b>Output</b> : Jumlah pengadaan peralatan perkantoran	3	Unit	3	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Unit	100%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	<b>Output</b> : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	3	Unit	3	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Unit	100%
	Pengadaan Peralatan Perkantoran	<b>Output</b> : Jumlah pengadaan peralatan perkantoran	4	Unit	4	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Unit	100%

3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase kedisiplinan aparatur</b>	100	%	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tercukupinya pakaian dinas	4	Stel	4	Stel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Stel	100%
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja OPD yang tepat waktu</b>	75	%	75	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	%	100%
	Penyusunan dan pelaporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun	Output : Tersusunnya laporan keuangan, semesteran dan tahunan	4	Laporan	4	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Laporan	100%
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Output : Terlaksananya musrenbang kecamatan yang partisipatif	12	Desa	12	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Desa	100%
5	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan kegiatan sosial masyarakat dan pemberdayaan</b>	75	Laporan	75	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	Laporan	100%
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Output : Jumlah Kegiatan Sosial Masyarakat	5	Kegiatan	5	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Kegiatan	100%
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Output : Jumlah Kegiatan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat	2	Kegiatan	2	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Kegiatan	100%
6	<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman di masyarakat</b>	100	%	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Output : Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	0,04	Kegiatan	0,04	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Kegiatan	100%
7	<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN</b>	<b>Persentase peningkatan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa</b>	100	%	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	100%
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Output : Jumlah Desa yang melaporkan administrasi dengan baik	5	Kegiatan	5	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Kegiatan	100%
8	<b>PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase pendapatan nilai asli daerah</b>	100	%	100	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	%	100%
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Output : Jumlah Intensifikasi Penerimaan PBB	4	Kegiatan	4	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Kegiatan	100%

Tabel 2.1.A  
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

NO	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
<b>2023</b>				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	Memenuhi Target	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%		
	Administrasi keuangan perangkat daerah	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	100%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%		
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%		
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	100%		
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%		
	Pengadaan Meubelair	100%		
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%			
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%		

3	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	100%		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%		
<b>2022</b>				
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%		
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	100%		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%		
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	100%		
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%		
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%		
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	100%		
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	100%		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	100%		
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	100%		
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%		
<b>2021</b>				
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	100%		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100%		
	<b>Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Perangkat Daerah</b>	100%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%		
	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100%		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%		
	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	100%		



	Penyediaan jasa peralatan dan Perengkapan Kantor	100%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		
	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	100%		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	100%		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%		
	Pengadaan Pakaian Khusus dan hari - hari tertentu	100%		
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	100%		
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	100%		
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	100%		
3	<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	100%		
	<b>koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	100%		
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%		
	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%		
4	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%		
<b>2020</b>				
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100%		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%		
	Penyediaan alat tulis Kantor	100%		

	Penyediaan barang cetakan dan <u>Penggandaan</u>	100%		
	Penyediaan peralatan & <u>Perlengkapan Kantor</u>	100%		
	Penyediaan Makan dan Minum	100%		
	Penyediaan Jasa Perkantoran	100%		
	Rapat-rapat Koordinasi dan <u>Konsultasi ke Luar Daerah</u>	100%		
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	100%		
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor.	100%		
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	100%		
	<u>Pengadaan Mebelair</u>	100%		
	Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	100%		
	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	100%		
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	100%		
	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	100%		
	Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat <u>kecamatan</u>	100%		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	100%		
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN</b>	100%		
	Fasilitasi kegiatan sosial <u>masarakat</u>	100%		
	Kordinasi pemberdayaan <u>masarakat</u>	100%		
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat <u>Kecamatan</u>	100%		
5	<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN</b>	100%		
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban <u>kecamatan</u>	100%		
<b>2019</b>				
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	100%		
	Penyediaan jasa komonikasi sumber daya air dan listrik	100%		
	Penyediaan jasa Administrasi <u>keuangan</u>	100%		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%		
	Penyediaan barang cetakan dan <u>penggandaan</u>	100%		
	Penyediaan makanan dan <u>minuman</u>	100%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan <u>Perlengkapan Kantor</u>	100%		
	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar <u>Daerah</u>	100%		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%		

	Penyediaan Jasa Perkantoran	100%		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%		
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	100%		
	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Kantor	100%		
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	100%		
	Pengadaan Mebelair	100%		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%		
	Pengadaan Peralatan Perkantoran	100%		
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	100%		
4	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	100%		
	Penyusunan dan pelaporan keuangan bulanan , smesteran dan akhir tahun	100%		
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100%		
5	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	100%		
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	100%		
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	100%		
6	<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	100%		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	100%		
7	<b>PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN</b>	100%		
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	100%		
8	<b>PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>	100%		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100%		

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Tukur dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026. Berikut Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kantor Kecamatan Tukur tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang sudah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Renstra Tahun 2018-2023 :

- Tujuan :  
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
- Sasaran 1 :  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan, Dengan Indikator Sasaran yaitu Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas
- Sasaran 2 :  
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan indikator sasaran Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina.
- Sasaran 3 :  
Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan, dengan indikator sasaran Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan.

- Sasaran 4:  
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan.

Renstra Tahun 2024-2026 :

- Tujuan :  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan
- Sasaran 1 :  
Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dengan Indikator Sasaran yaitu Indeks Penyelenggaraan Kecamatan
- Sasaran 2 :  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator sasaran Nilai SAKIP.

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Tutur tahun 2022, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu kinerja Kecamatan Tutur merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana pada tabel T-C.30 berikut:

**Tabel T-C.30**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tutur  
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Indikator Tujuan :</b>											
	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)			90	100	-	-	81.22	82.14	-	-	
	<b>Sasaran :</b>											
	Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas			90	100	-	-	85	93	-	-	
	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina			90	100	-	-	85	90	-	-	
	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan			90	100	-	-	85	88	-	-	
	Nilai SAKIP Kecamatan			75	80	80	81	71.92	73.80	80	81	
<b>2.</b>	<b>Indikator Tujuan :</b>											
	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)			-	-	95	96			95	96	
	<b>Sasaran :</b>											
	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan											
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan			75	80	80	81	71.92	73.80	80	81	

### 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berikut tabel Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah :

**TABEL 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Masih belum optimalnya kinerja pemerintahan di Tk. Kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Masih rendahnya Kualitas SDM (kompetensi dan kapasitas) dan makin minimnya jumlah SDM aparatur internal Kecamatan yang ada (karena purna tugas dan tidak ada penggantinya baik Kasi maupun pelaksana, jabatan merangkap); minimnya ASN yang bisa dan menguasai TI karena faktor usia dan gaptek, sehingga mengandalkan Tenaga Harian Lepas (THL).
		Masih belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan kolaborasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, baik di internal perangkat daerah maupun lintas sektor;
		Kurang maksimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk;
		Sangat terbatasnya anggaran yang dilimpahkan atau diberikan kecamatan (operasional kegiatan pendukungnya);
		Terbatasnya sarana dan pasarana pendukung untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima berbasis TI;
Belum maksimalnya realisasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	Keterlambatan Pembayaran PBB-P2	Masih belum maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tepat waktu;
		Dampak cuaca/iklim yang tidak menentu yang berdampak pada tanaman hortikultura warga masyarakat yang rusak dan gagal panen;

		Adanya oknum Aparat Pemdes yang menggunakan uang setoran PBB dari warga masy.desa;
		Banyaknya sapi perah milik petani peternak yang mati karena dampak dari adanya wabah PMK sebagai penopang utama perekonomian dan sumber utama pendapatan masyarakat;
Makin mahalnya harga kebutuhan pokok masyarakat khususnya sembako, lauk pauk, dan juga obat-obatan tanaman pertanian	Managemen pengendalian harga termasuk dalam pendistribusian yang belum berjalan optimal;	Kebiasaan/tren yang berlaku sejak era reformasi dimana perekonomian yang berlaku mengikuti harga pasar bebas sehingga harga seolah tak terkendali (sanksi yang tidak jelas dan tidak tegas);
		Adanya tren kebiasaan kenaikan harga 9 bahan pokok dan sembako, lauk pauk termasuk ongkos transportasi pada saat menghadapi hari raya keagamaan tahunan;
		Keterbatasan/ kelangkaan 9 bahan pokok dan sembako, lauk pauk, pupuk dan obat-obatan pertanian agrobis;
		Harga BBM yang tidak menentu (fluktuatif);
		Tidak jelasnya harga eceran maksimal yang berlaku karena tidak sinkronnya aturan dan ketentuan yang terkait;
Masih adanya bayi stunting dan keluarga beresiko stunting	Belum banyak warga masyarakat yang paham dan dapat mengimple-mentasikan "Program Kasih Bersanding Mesra"	Masih adanya sanitasi lingkungan rumah tangga yang tidak mendukung/ tidak memenuhi standar sesuai ketentuan (air tak layak konsumsi, tak ber-WC, RTLH, kumuh);
		Masih banyaknya warga masyarakat yang salah dalam pola asuh anak sejak pada 1000 HPK;
		Masih banyaknya warga masyarakat yang belum memahami pola dan tatacara memasak yang baik/benar, higienis dan sehat;
		Belum semua desa menjadi Kampung Keluarga Berkualitas;



Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Tukur merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Publik. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2022, Kecamatan Tukur menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

➤ Permasalahan:

- Terbatasnya Jumlah SDM yang memadai
- Belum terintegrasinya antara OPD terkait Pelayanan Publik dengan Pihak Kecamatan

➤ Hambatan:

- Tidak ada Tambahan ASN yang memadai;
- Kurangnya Koordinasi antar Seksi;
- Kurang Mendukungnya Sarana & Prasarana.

Selain itu, selama Tahun 2022, Kecamatan Tukur juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

➤ Tantangan:

- Tuntutan Masyarakat tentang Pelayanan yang lebih baik.

➤ Peluang:

- Pengembangan infra struktur dan administrasi pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Tukur dengan baik.
- Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas.
- Melibatkan peran serta Masyarakat yang aktif dalam pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2022, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tukur pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja yang Maksimal
- Ada Monitoring dan Evaluasi yang terjadwal secara rutin.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

a) Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2022, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, program dan kegiatan yang diusulkan sudah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yaitu Konektifitas Insfrastruktur sehingga sinkron dengan program RPJMD Kabupaten Pasuruan.

b) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2022, OPD Kecamatan Tukur, melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Tukur dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

c) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada tahun anggaran 2022, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Tukur melalui program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Serta penyusunan

dokumen perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

d) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi dan sebagai kawasan Bromo Tengger Semeru ( BTS ) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. Kecamatan Tukur melibatkan masyarakat secara langsung dan pelaku bisnis bersama sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Tukur, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tukur dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/Sub Kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Tukur dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tukur.

Rancangan awal RKPD yang ada adalah berasal dari usulan program dan kegiatan dari seluruh Seksi dengan

mendasarkan pada program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tukur, isu-isu lingkungan yang baru serta kinerja kegiatan yang belum tercapai pada Renstra sebelumnya.

Secara lengkap review terhadap Rancangan RKPD Kecamatan Tukur disajikan pada Tabel T-C.31, Sebagai Berikut:

Tabel T-C.31.  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024**  
**KABUPATEN PASURUAN**

SKPD : KECAMATAN TUTUR

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Tuttur	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	%	1,832,894,797	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Tuttur	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	%	1,825,528,341
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec Tuttur	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras</b>	10	Dokumen	5,000,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kec Tuttur	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras</b>	10	Dokumen	5,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Tuttur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	10	Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Tuttur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	10	Laporan	5,000,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec Tuttur	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan</b>	100	%	1,507,407,589	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec Tuttur	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan</b>	100	%	1,541,028,341
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tuttur	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang / Bulan	1,181,468,341	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Tuttur	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	Orang / Bulan	1,181,468,341
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Tuttur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	Dokumen	291,379,248	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec Tuttur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	Dokumen	325,000,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Tuttur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	34,560,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Tuttur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	Dokumen	34,560,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec Tuttur	<b>Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan</b>	100	%	10,000,000						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Tuttur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	10,000,000						
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec Tuttur	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	100	%	138,500,000	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec Tuttur	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	100	%	138,500,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Tuttur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Tuttur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	Paket	50,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Tuttur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	8,500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Tuttur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	8,500,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	80,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	80,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec Tuteur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kec Tuteur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	2	Dokumen								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Tuteur	JumlahPaket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	Paket								
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50	Laporan								
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec Tuteur	<b>Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	%	<b>45,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec Tuteur	<b>Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100	%	<b>10,000,000</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Tuteur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Tuteur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Tuteur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			-							
	Pengadaan Meubelair	Kec Tuteur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-							
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Tuteur	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	35,000,000							
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec Tuteur	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%	<b>34,339,008</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec Tuteur	<b>Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%	<b>40,000,000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	34,339,008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Laporan					5	Laporan		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec Tuteur	<b>Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%	<b>92,648,200</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kec Tuteur	<b>Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%	<b>91,000,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Tuteur	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	77,648,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Tuteur	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	85,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan / Mesin Lainnya	Kec Tuteur	Jumlah Peralatan yang di pelihara	3	Unit	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan / Mesin Lainnya	Kec Tuteur	Jumlah Peralatan yang di pelihara	3	Unit	6,000,000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Tuteur	Persentase Dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	<b>60,000,000</b>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Tuteur	Persentase Dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	<b>32,000,000</b>	
			Indeks Pelayanan Kecamatan	3.5	<b>3.51</b>					3.5	<b>3.51</b>		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	Laporan	45,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	Laporan	15,000,000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Laporan	45,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	Laporan	15,000,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	4	Laporan	5,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	4	Laporan	5,000,000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	5,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	5,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Tuteur	Prosentase Realisasi PBB-P2	100	%	10,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec Tuteur	Prosentase Realisasi PBB-P2	100	%	12,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Tutur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Desa	10,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Tutur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Desa	12,000,000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Tutur	Persentase Kelompok Masyarakat yang terbina dengan Baik	100	%	<b>50,000,000</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Tutur	Persentase Kelompok Masyarakat yang terbina dengan Baik	100	%	<b>50,000,000</b>	
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kec Tutur	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	100	%	<i>50,000,000</i>	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Kec Tutur	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	100	%	<i>50,000,000</i>	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tutur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	25,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Tutur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	50,000,000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Tutur	<i>Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	5	Lembaga	25,000,000							
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Tutur	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	100	%	<b>9,000,000</b>	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Tutur	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	100	%	<b>9,000,000</b>	
	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kec Tutur	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	4	Laporan	<b>6,000,000</b>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Kec Tutur	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	4	Laporan	<i>9,000,000</i>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Tutur	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	4	Laporan	3,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Tutur	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	4	Laporan	9,000,000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Tutur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tooh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	3,000,000							



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	Kec Tuteur	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>	1	Laporan	<b>3,000,000</b>							
	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	3,000,000.00							
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Tuteur	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan kewenangan	100	%	<b>15,000,000</b>	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Tuteur	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan kewenangan	100	%	<b>15,000,000</b>	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kec Tuteur	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	1	Laporan	15,000,000	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Kec Tuteur	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	1	Laporan	15,000,000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Tuteur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	Orang	15,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Tuteur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	Orang	15,000,000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Tuteur	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100	%	<b>30,000,000</b>	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Tuteur	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100	%	<b>12,000,000</b>	
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa</i>	Kec Tuteur	<i>Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti</i>	100	%	30,000,000	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa</i>	Kec Tuteur	<i>Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti</i>	100	%	12,000,000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Laporan	6,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Tuteur	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Laporan	6,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Kec Tukur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	6,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Kec Tukur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	6,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Tukur	Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dihasilkan	1	Dokumen	3,000,000							
	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Tukur	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dokumen	6,000,000							
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec Tukur	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	6,000,000							
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Tukur	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	1	Dokumen	3,000,000							
				TOTAL		<b>1,996,894,797</b>					TOTAL	<b>1,943,528,341</b>	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tukur.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis (Pembangunan Fisik) sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Tukur.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat Desa/kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan hingga melalui Forum SKPD. Kecamatan Tukurmempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah terhadap Kecamatan Tukur.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tukur disajikan dalam tabel T-C.32 dalam tabel dibawah ini.



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-target yang ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Tukur lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RPD yang dilakukan oleh Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

##### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tukur dari penjabaran tujuan nomor 3, adalah sebagai berikut:

- Tujuan :
  - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan
- Sasaran 1 :
  - Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dengan Indikator Sasaran yaitu Indeks Penyelenggaraan Kecamatan.
- Sasaran 2 :
  - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator sasaran Nilai SAKIP.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan secara detail dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

### 3.3 Program Dan Kegiatan

Rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tutur tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, Program dan Sasaran Tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Tutur Tahun 2024-2026.

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra 2018-2023, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tutur, isu-isu penting yang berkaitan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tutur di tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan

- Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

##### *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum*

- Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan*



*Perkada*

- Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5 PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2024 dan diperkirakan maju Tahun 2025 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada tabel T-C 33 berikut ini:

Tabel T-C.33  
**RINCIAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
 KABUPATEN PASURUAN**

Nama OPD : KECAMATAN TUTUR

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025		
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Urusan Kewilayahan									
	Bidang Urusan Kewilayahan									
7.01.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kec. Tukur	100	Persen	1,825,528,341		100	Persen	3,000,000
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Kec. Tukur	10	Dokumen	5,000,000		10	Dokumen	3,000,000
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tukur	10	Dokumen	5,000,000		10	Dokumen	3,000,000
					Belanja Pegawai : -	-				-
					Belanja Barang & Jasa : 5,000,000	5,000,000				3,000,000
					Belanja Modal : -	-				-
7.01.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	Kec. Tukur	100	%	1,541,028,341	DAU	100	%	2,598,388,122
7.01.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tukur	11	Org/bln	1,181,468,341		11	Org/bln	2,234,728,122
					Belanja Pegawai : 1,181,468,341	1,181,468,341				2,234,728,122
					Belanja Barang & Jasa : -	-				-
					Belanja Modal : -	-				-
7.01.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tukur	15	Dokumen	325,000,000		15	Dokumen	325,644,000
					Belanja Pegawai : -	-				-
					Belanja Barang & Jasa : 325,000,000	325,000,000				325,644,000
					Belanja Modal : -	-				-
7.01.01.2.02.03	3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Tukur	4	Dokumen	34,560,000		4	Dokumen	38,016,000
					Belanja Pegawai : -	-				-
					Belanja Barang & Jasa : 34,560,000	34,560,000				38,016,000
					Belanja Modal : -	-				-

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025			
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	3			100	%	143,000,000			100	%	-
						Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 4,500,000 Belanja Modal : -			3	Paket	- 20,000,000 -
7.01.01.2.06	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemeruahan administrasi umum Perangkat Daerah		100	%	138,500,000			100	%	100,000,000
7.01.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tukur	1	Paket	4,500,000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 4,500,000 Belanja Modal : -	DAU		3	Paket	20,000,000 - 20,000,000 -
7.01.01.2.06.03	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Tukur	1	Paket	13,700,000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 13,700,000 Belanja Modal : -	DAU		3	Paket	20,000,000 - 20,000,000 -
7.01.01.2.06.06	3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tukur	1	Paket	- Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : - Belanja Modal : -	DAU		3	Paket	20,000,000 - 20,000,000 -
7.01.01.2.06.08	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tukur	1	Paket	6,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 6,000,000 Belanja Modal : -	DAU		3	Paket	20,000,000 - 20,000,000 -
7.01.01.2.06.02	5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Tukur	3	Paket	21,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 21,000,000 Belanja Modal : -	DAU		3	Paket	20,000,000 - 20,000,000 -
7.01.01.2.06.05	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Tukur	2	Paket	8,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 8,000,000 Belanja Modal : -	DAU		2	Paket	10,000,000 - 10,000,000 -
7.01.01.2.06.09	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tukur	72	Laporan	85,300,000 Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 85,300,000 Belanja Modal : -	DAU		50	Laporan	70,000,000 - 70,000,000 -

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025			
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
7.01.01.2.07	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tuter	100	%	10,000,000		100	%	30,000,000	
7.01.01.2.07.10	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Tuter	2	Unit	10,000,000	DAU	2	Unit	30,000,000	
Belanja Pegawai						:	-			-	-
Belanja Barang & Jasa						:	-			-	30,000,000
						Belanja Modal	:	10,000,000	-	-	
7.01.01.2.07.02	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Tuter	1	Unit	-	DAU	2	Unit	30,000,000	
Belanja Pegawai						:	-			-	-
Belanja Barang & Jasa						:	-			-	30,000,000
						Belanja Modal	:	-	-	-	
7.01.01.2.07.05	3 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Tuter	1	Paket	-	DAU	2	Unit	30,000,000	
Belanja Pegawai						:	-			-	-
Belanja Barang & Jasa						:	-			-	30,000,000
						Belanja Modal	:	-	-	-	
7.01.01.2.07.10	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Tuter	1	Unit	-	DAU	2	Unit	30,000,000	
Belanja Pegawai						:	-			-	-
Belanja Barang & Jasa						:	-			-	30,000,000
						Belanja Modal	:	-	-	-	
7.01.01.2.08	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tuter	100	%	40,000,000		100	%	38,000,000	
7.01.01.2.08.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Tuter	48	Laporan	40,000,000	DAU	48	Laporan	38,000,000	
Belanja Pegawai						:	-			-	-
Belanja Barang & Jasa						:	40,000,000			-	38,000,000
						Belanja Modal	:	-	-	-	
7.01.01.2.08.03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tuter	12	Laporan	-	DAU	48	Laporan	38,000,000	
Belanja Pegawai						:	-			-	-
Belanja Barang & Jasa						:	-			-	38,000,000
						Belanja Modal	:	-	-	-	

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025		
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7.01.01.2.09	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tukur	100	%	91,000,000		100	%	185,000,000
7.01.01.2.09.02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Tukur	8	Unit	85,000,000	DAU	8	Unit	85,000,000
						Belanja Pegawai : -				-
						Belanja Barang & Jasa : 85,000,000				85,000,000
						Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.09.10	2 Pemeliharaan Peralatan / Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang di pelihara	Kec. Tukur	3	Unit	6,000,000	DAU	3	Jenis	100,000,000
						Belanja Pegawai : -				-
						Belanja Barang & Jasa : 6,000,000				100,000,000
						Belanja Modal : -				-
7.01.01.2.09.05	2 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Tukur	6	Unit	-	DAU	3	Jenis	100,000,000
						Belanja Pegawai : -				-
						Belanja Barang & Jasa : -				100,000,000
						Belanja Modal : -				-
7.01.02.2	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Dokumen non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	Kec. Tukur	100	%	32,000,000		100	%	35,000,000
7.01.02.2.01	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tukur	5	Laporan	15,000,000		5	Laporan	20,000,000
7.01.02.2.01.01	1 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tukur	5	Laporan	15,000,000		5	Laporan	10,000,000
						Belanja Pegawai : -				-
						Belanja Barang & Jasa : 15,000,000				10,000,000
						Belanja Modal : -				-
	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tukur			-				10,000,000
						Belanja Pegawai : -				-
						Belanja Barang & Jasa : -				10,000,000
						Belanja Modal : -				-

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025		
				T. CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	T. CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	Kec. Tukur	1	Laporan	5,000,000			4	Laporan	10,000,000
	1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tukur	1	Laporan	5,000,000			4	Laporan	10,000,000
						Belanja Pegawai : -					-
						Belanja Barang & Jasa : 5,000,000					10,000,000
						Belanja Modal : -					-
	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2	Kec. Tukur	100	%	12,000,000			100	%	5,000,000
	1 Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tukur	12	Laporan	12,000,000			12	Laporan	5,000,000
						Belanja Pegawai : -					-
						Belanja Barang & Jasa : 12,000,000					5,000,000
						Belanja Modal : -					-
7.01.03	3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif Persentase kelompok masyarakat desa/kelurahan yang aktif	Kec. Tukur	100	%	50,000,000	DAU		100	%	40,000,000
7.01.03.2.01	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tukur	4	Laporan	50,000,000			4	Laporan	40,000,000
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tukur	5	Lembaga	25,000,000			5	Lembaga	10,000,000
						Belanja Pegawai : -					-
						Belanja Barang & Jasa : 25,000,000					10,000,000
						Belanja Modal : -					-
7.01.03.2.01.03	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tukur	4	Laporan	25,000,000					30,000,000
						Belanja Pegawai : -					-
						Belanja Barang & Jasa : 25,000,000					30,000,000
						Belanja Modal : -					-
7.01.04	4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	Kec. Tukur	100	%	9,000,000			100	%	30,000,000
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tukur	4	Laporan	9,000,000			4	Laporan	20,000,000
7.01.04.2.01.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan Instansi Vertikal di	Kec. Tukur	4	Laporan	9,000,000	DAU		4	Laporan	10,000,000
						Belanja Pegawai : -					-
						Belanja Barang & Jasa : 9,000,000					10,000,000

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025		
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		wilayah Kecamatan			Belanja Modal :	-			-	
7.01.04.2.01.02	2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Tukur	1	Laporan	-	DAU		10,000,000	
					Belanja Pegawai :	-			-	
					Belanja Barang & Jasa :	-			10,000,000	
					Belanja Modal :	-			-	
7.01.04.2.02	2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kec. Tukur	1	Laporan	-			10,000,000	
7.01.04.2.02.01	1 Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Tukur	1	Laporan	-	DAU		10,000,000	
					Belanja Pegawai :	-			-	
					Belanja Barang & Jasa :	-			10,000,000	
					Belanja Modal :	-			-	
7.01.06	5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik  Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Raperdes APBDes	Kec. Tukur	100	%	12,000,000		100	%	20,000,000
7.01.06.2.01	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti	Kec. Tukur	100	%	12,000,000	DAU	100	%	20,000,000
7.01.06.2.01.06	1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tukur	1	Laporan	6,000,000		1	Laporan	-
					Belanja Pegawai :	-			-	
					Belanja Barang & Jasa :	6,000,000			10,000,000	
					Belanja Modal :	-			-	
7.01.06.2.01.09	2 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Tukur	1	Dokumen	6,000,000	DAU	1	Dokumen	-
					Belanja Pegawai :	-			-	
					Belanja Barang & Jasa :	6,000,000			10,000,000	
					Belanja Modal :	-			-	
7.01.05	6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	Kec. Tukur	100	%	15,000,000		100	%	10,000,000
7.1.05.2.01	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tukur	75	Org	15,000,000	DAU	75	Org	10,000,000

KODE	URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
				T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		T. CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tukur	75	15,000,000			75	10,000,000
				<i>Org</i>	Belanja Pegawai : - Belanja Barang & Jasa : 15,000,000 Belanja Modal : -			<i>Org</i>	- 10,000,000 -
					Belanja Pegawai : 1,181,468,341			Belanja Pegawai :	2,234,728,122
					Belanja Barang & Jasa : 762,060,000			Belanja Barang & Jasa :	814,660,000
					Belanja Modal : -			Belanja Modal :	-
					Total Belanja PD : 1,943,528,341				3,049,388,122



#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Kualitas tatakelola pemerintahan (good governance) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan “Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”.

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan TuturKabupaten Pasuruan menyusun Rencana kerja tahun 2024 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Strategis Kecamatan Tutur tahun 2024 – 2026. Rencana Kerja Pagu Indikatif Tahun 2024 sebesar Rp. 1.943.528.341,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah ) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan tahun 2024 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun-tahun sebelumnya, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dimana implikasinya Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisis RENJA yang ada, Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan dan

lembaga lainya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amien.

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**